LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-12/PJ/2019
TENTANG : TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN ATAS IMPOR YANG MERUPAKAN PEMASUKAN BARANG YANG DIGUNAKAN UNTUK KEGIATAN PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK

A. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN (SKJLN)

Nomor : ..... (1) ....., ... (3)
Lampiran : ..... (2)
Perihal : Permohonan Penerbitan SKJLN

Yth. Direktur Jenderal Pajak
c.q. Kepala KPP ..... (4)
di ..... (5)

Sehubungan dengan diperlukannya SKJLN sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan nomor 178/PMK.04/2017 jo. Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER- /PJ/2019, dengan ini:

Nama : ..... (6)
NPWP : ..... (7)
Alamat : ..... (8)
Surel Aktif : ..... (9)
bertindak:

☐ atas nama diri sendiri.

☐ sebagai pengurus*) dari Wajib Pajak badan:
Nama : ..... (10)
NPWP : ..... (11)
Alamat : ..... (12)

mengajukan permohonan penerbitan SKJLN dan dengan ini menyatakan telah melakukan kontrak/perjanjian pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean dengan informasi sebagai berikut:

Nama Lawan Transaksi : ..... (13)
Alamat Lawan Transaksi : ..... (14)
Jenis Transaksi : ..... (15)
Nilai Transaksi : ..... (16)
Nomor Kontrak : ..... (17)
Tanggal Kontrak : ..... (18)
Tanggal Berakhir Kontrak : ..... (19)
Nomor Adendum Kontrak : ..... (20)
Tanggal Adendum Kontrak : ..... (21)
Tanggal Berakhir Adendum Kontrak : ..... (22)
Barang yang diimpor : ..... (23)

No	Jenis dan Uraian Barang	Kuantitas
-1-	-2-	-3-

Dengan ini Saya menyatakan bahwa informasi yang Saya sampaikan dalam permohonan ini adalah sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan bersedia bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan dalam hal terdapat ketidaksesuaian.

Demikian surat permohonan disampaikan.

Wajib Pajak/Pengurus*

..... (24)

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN (SKJLN)

Nomor (1)	:	Diisi dengan nomor surat
Nomor (2)	:	Diisi dengan jumlah lampiran surat
Nomor (3)	:	Diisi dengan tempat dan tanggal surat
Nomor (4)	:	Diisi dengan nama KPP tempat diajukan permohonan
Nomor (5)	:	Diisi dengan alamat KPP tempat diajukan permohonan
Nomor (6)	:	Diisi dengan Nama Wajib Pajak Orang Pribadi atau Pengurus dalam hal diajukan oleh Wajib Pajak Badan
Nomor (7)	:	Diisi dengan NPWP Wajib Pajak Orang Pribadi atau Pengurus dalam hal diajukan oleh Wajib Pajak Badan
Nomor (8)	:	Diisi dengan alamat Wajib Pajak Orang Pribadi atau Pengurus dalam hal diajukan oleh Wajib Pajak Badan;
Nomor (9)	:	Diisi dengan surel aktif Wajib Pajak Orang Pribadi atau Pengurus dalam hal diajukan oleh Wajib Pajak Badan
Nomor (10)	:	Diisi dengan Nama Wajib Pajak Badan
Nomor (11)	:	Diisi dengan NPWP Wajib Pajak Badan
Nomor (12)	:	Diisi dengan alamat Wajib Pajak Badan
Nomor (13)	:	Diisi dengan nama pihak luar negeri yang menjadi lawan transaksi
Nomor (14)	:	Diisi dengan alamat pihak luar negeri yang menjadi lawan transaksi
Nomor (15)	:	Diisi dengan jenis transaksi pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean : sewa menggunakan mekanisme impor sementara atau sewa tidak menggunakan mekanisme impor sementara.
Nomor (16)	:	Diisi dengan nilai kontrak atas transaksi pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean
Nomor (17)	:	Diisi dengan nomor kontrak transaksi pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean
Nomor (18)	:	Diisi dengan tanggal kontrak transaksi pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean
Nomor (19)	:	Diisi dengan tanggal berakhirnya kontrak transaksi pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean
Nomor (20)	:	Diisi dengan nomor adendum kontrak transaksi pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean, hanya dalam hal ada perubahan atas kontrak sebelumnya
Nomor (21)	:	Diisi dengan tanggal adendum kontrak transaksi pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean, hanya dalam hal ada perubahan atas kontrak sebelumnya
Nomor (22)	:	Diisi dengan tanggal berakhirnya adendum kontrak transaksi pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean, hanya dalam hal ada perubahan atas kontrak sebelumnya
Nomor (23)	:	Diisi dengan nama atau jenis barang yang akan diajukan permohonan. Hanya diisi dalam hal Wajib Pajak tidak menggunakan mekanisme impor sementara.
Kolom -1-	:	diisi dengan nomor urut
Kolom -2-	:	diisi dengan jenis dan uraian barang yang akan diimpor
Kolom -3-	:	diisi dengan jumlah unit
Nomor (24)	:	Diisi dengan nama dan tanda tangan pemohon serta cap perusahaan
*	:	Coret yang tidak perlu. Pimpinan tertinggi atau pengurus yang diberikan wewenang untuk menjalankan kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan perpajakan.

B. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN (SKJLN)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP .....(1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK .....(2)
JALAN .....
TELEPON...; FAKSIMILE ...; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL: pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN

Nomor : SKJLN- ...../20XX (3)
Tanggal : ..... (4)

Berdasarkan permohonan Wajib Pajak nomor ..... (5) tanggal ..... (6), kami sampaikan bahwa Wajib Pajak:

Nama : ..... (7)
NPWP : ..... (8)
Alamat : ..... (9)

telah melakukan kontrak/perjanjian pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dengan rincian informasi transaksi sebagai berikut:

Nama Lawan Transaksi : ..... (10)
Alamat Lawan Transaksi : ..... (11)
Jenis Transaksi : ..... (12)
Nilai Transaksi : ..... (13)
Nomor Kontrak : ..... (14)
Tanggal Kontrak : ..... (15)
Nomor Adendum Kontrak : ..... (16)
Tanggal Adendum Kontrak : ..... (17)
Nilai PPN : Rp. ..... (18)
Barang yang diimpor : ..... (19)

No	Jenis dan Uraian Barang	Kuantitas
-1-	-2-	-3-

Surat keterangan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan .....(20).

Demikian disampaikan SKJLN ini untuk dipergunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kode Verifikasi SKJLN : ..... (21)

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN

Nomor (1)	:	Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP terdaftar
Nomor (2)	:	Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak terdaftar
Nomor (3)	:	Diisi dengan nomor surat
Nomor (4)	:	Diisi dengan tanggal penerbitan SKJLN
Nomor (5)	:	Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak
Nomor (6)	:	Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak
Nomor (7)	:	Diisi dengan Nama Wajib Pajak
Nomor (8)	:	Diisi dengan NPWP Wajib Pajak
Nomor (9)	:	Diisi dengan alamat Wajib Pajak
Nomor (10)	:	Diisi dengan nama pihak luar negeri yang menjadi lawan transaksi
Nomor (11)	:	Diisi dengan alamat pihak luar negeri yang menjadi lawan transaksi
Nomor (12)	:	Diisi dengan jenis transaksi pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean: sewa menggunakan mekanisme impor sementara atau sewa tidak menggunakan mekanisme impor sementara.
Nomor (13)	:	Diisi dengan nilai transaksi pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean
Nomor (14)	:	Diisi dengan nomor kontrak transaksi pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean
Nomor (15)	:	Diisi dengan tanggal kontrak transaksi pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean
Nomor (16)	:	Diisi dengan nomor adendum kontrak transaksi pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean, hanya dalam hal ada perubahan atas kontrak sebelumnya
Nomor (17)	:	Diisi dengan tanggal adendum kontrak transaksi pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean, hanya dalam hal ada perubahan atas kontrak sebelumnya
Nomor (18)	:	Diisi dengan nilai PPN atas pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean
Nomor (19)	:	Diisi dengan nama atau jenis barang yang akan diajukan permohonan. Hanya diisi dalam hal Wajib Pajak tidak menggunakan mekanisme impor sementara.
Kolom -1-	:	diisi dengan nomor urut
Kolom -2-	:	diisi dengan jenis dan uraian barang yang akan diimpor
Kolom -3-	:	diisi dengan jumlah unit
Nomor (20)	:	Diisi dengan tanggal berakhirnya kontrak atau tanggal berakhirnya adendum kontrak dalam hal ada perubahan atas kontrak sebelumnya
Nomor (21)	:	Diisi dengan Kode Verifikasi SKJLN

C. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP .....(1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK .....(2)
JALAN .....
TELEPON...; FAKSIMILE ...; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL: pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

SURAT PENOLAKAN PENERBITAN
SURAT KETERANGAN PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN
DI DALAM DAERAH PABEAN

Nomor : SKJLN-TLK- ...../20XX (3)
Tanggal : ..... (4)

Berdasarkan permohonan Wajib Pajak nomor ..... (5) tanggal ..... (6), kami sampaikan bahwa Wajib Pajak:

Nama : ..... (7)
NPWP : ..... (8)
Alamat : ..... (9)

tidak dapat diberikan Surat Keterangan Pemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean karena:

- [ ] Tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak orang pribadi yang bersangkutan atau oleh pengurus, untuk Wajib Pajak Badan;
- [ ] Tidak menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER- /PJ/2019;
- [ ] Tidak menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir; dan/atau
- [ ] Tidak menyampaikan SPT Masa PPN untuk 3 (tiga) Masa Pajak terakhir.

Demikian untuk dimaklumi.

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN

Nomor (1)	:	Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP terdaftar
Nomor (2)	:	Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak terdaftar
Nomor (3)	:	Diisi dengan nomor surat
Nomor (4)	:	Diisi dengan tanggal penerbitan SKJLN
Nomor (5)	:	Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak
Nomor (6)	:	Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak
Nomor (7)	:	Diisi dengan Nama Wajib Pajak
Nomor (8)	:	Diisi dengan NPWP Wajib Pajak
Nomor (9)	:	Diisi dengan alamat Wajib Pajak

D. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN PEMBATALAN SKJLN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP .....(1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK .....(2)
JALAN .....
TELEPON...; FAKSIMILE ...; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL: pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN PEMBATALAN
SKJLN

Nomor : KET-BTL ..... (3)

Sehubungan dengan diperolehnya data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak:

Nama : ..... (4)
NPWP : ..... (5)
Alamat : ..... (6)

tidak berhak memperoleh SKJLN, atas SKJLN Nomor ..... (7) tanggal ..... (8) dibatalkan.

Oleh karena itu kepada Wajib Pajak yang bersangkutan wajib membayar Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

.....(9).....
a.n Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak

.....(10).....

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN PEMBATALAN SKJLN

Nomor (1)	:	Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP terdaftar
Nomor (2)	:	Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak terdaftar
Nomor (3)	:	Diisi dengan nomor Surat Keterangan Pembatalan SKJLN
Nomor (4)	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak
Nomor (5)	:	Diisi dengan NPWP Wajib Pajak
Nomor (6)	:	Diisi dengan alamat Wajib Pajak
Nomor (7)	:	Diisi dengan nomor SKJLN
Nomor (8)	:	Diisi dengan tanggal SKJLN
Nomor (9)	:	Diisi dengan tempat dan tanggal ditandatanganinya Surat Keterangan Pembatalan SKJLN
Nomor (10)	:	Diisi dengan tanda tangan dan nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit serta dibubuhi cap Kantor Pelayanan Pajak penerbit.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

ROBERT PAKPAHAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

ttd.

ODING RIFALDI
NIP 197003111995031002